KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : AJI Imbau DPR Tidak Batasi Pers Meliput Wakil Rakyat
Tanggal : Selasa, 12 Februari 2013
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

AJI Imbau DPR tidak Batasi Pers Meliput Wakil Rakyat

ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak mengekang kebebasan pers dalam pembuatan peraturan peliputan pers di lingkungan DPR.

"Peraturan peliputan di mana pun memang dibutuhkan untuk mengatur agar proses peliputan dapat berjalan lancar. Namun, peraturan itu tidak boleh mengekang kebebasan pers. Bahkan, seharusnya peraturan dibuat untuk memudahkan akses pencarian info bagi jurnalis," kata Ketua Umum AJI Eko Maryadi, di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan AJI mendukung adanya peraturan peliputan di lembaga mana pun asalkan tidak menghambat tugas jurnalis untuk meliput, tidak mempersulit akses informasi bagi pers, dan tidak mengekang kebebasan pers.

"Kalau peraturan peliputan di DPR sudah membentur tiga unsur tersebut, peraturan itu harus dikritisi," ujarnya.

Dia mengaku AJI pernah diundang Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk membahas rancangan peraturan peliputan di DPR. Saat mengundang, pihak BURT mengatakan akan membuat aturan untuk menutup akses bagi orang-orang yang suka mengaku-aku sebagai wartawan.

"Mereka bilang di DPR banyak sekali wartawan bohongan, jadi mereka ingin membuat aturan untuk memisahkan antara wartawan yang bohongan dan yang benar. Kalau dari sisi itu, AJI tentu setuju. Tetapi, kalau dampak dari peraturan itu justru menghalangi pers, misalnya dalam melakukan fungsi kontrol pemerintah, kami rasa peraturan itu harus ditinjau ulang," kata Eko.

Dalam rapat paripurna Selasa (5/2) lalu, pengesahan rancangan peraturan peliputan di DPR yang diajukan BURT ditunda karena mendapat banyak kritikan dari para wakil rakyat.

> **"Kalau dampak dari peraturan itu justru menghalangi pers, misalnya dalam fungsi mengontrol pemerintah, kami rasa peraturan itu harus ditinjau ulang."**
>
> **Eko Maryadi**
> Ketua Umum AJI

Akbar Faisal, anggota Fraksi Partai Hanura, misalnya, menilai substansi peraturan peliputan itu menunjukkan kealergian DPR terhadap pers.

Rahadi Zakaria dari Fraksi PDIP juga mempertanyakan adanya sanksi dari Setjen DPR terhadap wartawan yang melanggar aturan. Menurut dia, wartawan hanya bisa dijatuhi sanksi oleh perusahaan tempat dia bekerja, bukan oleh Setjen DPR.

Saat menanggapi berbagai kritikan terhadap rancangan aturan itu, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR Djaka Dwi Winarko mengatakan aturan itu tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak pers dalam mencari berita dan informasi di lingkungan DPR. (Ant/P-2)